

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
PARIWISATA DALAM PROGRAM SATU DESA SATU DESTINASI  
WISATA (*ONE VILLAGE ONE DESTINATION*) DI DESA GUNUNG REJO  
KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RIDHO MAKARIM**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PROGRAM SATU DESA SATU DESTINASI WISATA (*ONE VILLAGE ONE DESTINATION*) DI DESA GUNUNG REJO KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh**

**MUHAMMAD RIDHO MAKARIM**

Desa Gunung Rejo sebagai salah satu desa wisata unggulan Kabupaten Pesawaran memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran membuat kebijakan untuk pengembangan pariwisata yang tertuang dalam Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 320/IV.04/HK/2018 tentang Penetapan desa wisata. Tujuan penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunung Rejo. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Van Horn dan Van Meter. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah : Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan sudah berhasil, para pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata ini sudah cukup memahami ukuran dan tujuan kebijakan. Indikator sumber daya masih kurang namun di sisi lain terdapat adanya ketercukupan sumber daya finansial. Indikator karakteristik agen pelaksana sudah berhasil, para agen pelaksana kebijakan sudah memusatkan perhatian kepada masyarakat dan alam. Indikator sikap/kecenderungan agen pelaksana sudah berhasil, para agen pelaksana sudah sepakat menolak swasta dalam pengelolaan pariwisata di Desa Gunung Rejo, Indikator Komunikasi belum berhasil, komunikasi yang terjalin selama ini belum optimal karena belum adanya forum pertemuan dan laporan resmi antar agen pelaksana kebijakan. Indikator lingkungan sosial, ekonomi, politik sudah berhasil, lingkungan politik dirasa bersih dan mendukung, dari segi ekonomi sudah adanya ketercukupan modal usaha untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif yang dijalankan oleh Bumdes dan Pokdarwis Desa Gunung Rejo terutama yang berkaitan dengan usaha kepariwisataan dan lingkungan sosial juga berjalan kondusif. Saran dari hasil penelitian ini adalah : Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu meningkatkan pemberian bantuan modal usaha dan pembinaan terhadap anggota pokdarwis.

***Kata kunci: Kebijakan, Pengembangan, Pariwisata, One Village One Destination, Kabupaten Pesawaran***

## ***ABSTRACT***

### ***ANALYSIS OF TOURISM DEVELOPMENT POLICY IMPLEMENTATION IN THE ONE VILLAGE ONE DESTINATION PROGRAM IN GUNUNG REJO VILLAGE, WAY RATAI DISTRICT, PESAWARAN REGENCY***

***By***

**MUHAMMAD RIDHO MAKARIM**

Gunung Rejo Village as one of the leading tourist villages in Pesawaran Regency has considerable potential to be developed. The Pesawaran Regency Government makes policies for tourism development as stated in the Pesawaran Regent's Decree Number 320/IV.04/HK/2018 concerning the Designation of tourist villages. The purpose of this study is to analyze the implementation of tourism development policies in Gunung Rejo Village. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The theory used is the theory of Van Horn and Van Meter. The results and conclusions of this study are: Indicators of Policy Size and Objectives have been successful, the implementers of this tourism development policy have sufficiently understood the size and objectives of the policy. Indicators of resources are still lacking but on the other hand there is sufficient financial resources. Indicators of the characteristics of implementing agents have been successful, policy implementing agents have focused on society and nature. Indicators of attitude/tendency of implementing agents have been successful, implementing agents have agreed to reject the private sector in tourism management in Gunung Rejo Village, Communication Indicators have not been successful, communication that has been established so far has not been optimal because there is no forum for meetings and official reports between policy implementing agents. the social, economic, political environment has been successful, the political environment is considered clean and supportive, from an economic perspective there is sufficient business capital to support creative economic activities carried out by Bumdes and Pokdarwis in Gunung Rejo Village, especially those related to tourism businesses and the social environment is also running conducive . Suggestions from the results of this study are: The Pesawaran Regency Government needs to increase the provision of business capital assistance and guidance to Pokdarwis members.

***Keywords: Policy, Development, Tourism, One Village One Destination, Pesawaran District***

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
PARIWISATA DALAM PROGRAM SATU DESA SATU DESTINASI  
WISATA (*ONE VILLAGE ONE DESTINATION*) DI DESA GUNUNG REJO  
KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh**

**MUHAMMAD RIDHO MAKARIM**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi

: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM  
PROGRAM SATU DESA SATU DESTINASI  
WISATA (*ONE VILLAGE ONE  
DESTINATION*) DI DESA GUNUNG REJO  
KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN  
PESAWARAN

Nama

: *Muhammad Ridho Makarim*

No. Pokok Mahasiswa

: 1716021028

Bagian

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Feni'.

Dr. Feni Rosalia, M.Si  
NIP : 196902191994032001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kris'.

Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.  
NIP : 231610900918201

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

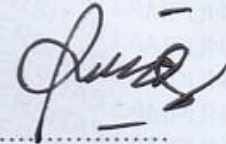
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sigit'.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.  
NIP : 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



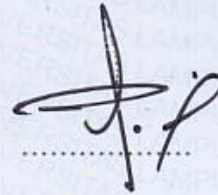
Sekretaris

: **Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.**



Penguji

: **Drs. Ismono Hadi, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Agustus 2021



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**Muhammad Ridho Makarim**  
NPM. 1716021028

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Muhammad Ridho Makarim, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 April 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Ir. Rozi Hasim dan Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Al-Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2005
2. SD Al-Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2011
3. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2014
4. SMA AL-Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2017

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi SNMPTN. Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada pertengahan Juli 2017. Semasa kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ Ilmu Pemerintahan) sebagai anggota.



## **MOTTO**

*“Tersungkur yang membuatmu bersyukur.. lebih baik ketimbang indah yang  
membuatmu patah..”*

**(Muhammad Ridho Makarim)**

*“Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan  
membunuhmu.”*

**(Umar bin Khattab)**

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:*

### **Kedua Orang Tua**

*Bapak Ir. Rozi Hasim dan Dra. Dian Kagungan, M.H  
Yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, do'a,  
Dan dukungan moral yang tidak pernah berhenti dan takkan  
Mampu terbalas serta akan terus hadir dalam perjalanan hidup ini.*

### **Saudara Yang Ku Banggakan**

*Muhammad Faridz Makarim  
Atas segala motivasi, dukungan, dan do'a  
untuk keberhasilanku*

### **Almamater Tercinta Universitas Lampung**

*Sebagai tempatku berproses dan belajar agar lebih baik*

## SANWACANA

Alhamdulillah, yang utama kepada ALLAH SWT, tercurah segala puji dan syukur karena atas segala kehendak dan kekuasaanya, penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Skripsi ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesawaran (Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Program Satu Desa Satu Destinasi Wisata (*One Village One Destination*) di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran) Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak.

Terwujudnya skripsi ini, telah melibatkan berbagai pihak yang telah dengan rela membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Feni Rosalia M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan pengarahan, saran, bimbingan, motivasi dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Kris Ari Suryandari, S.I.P, M.IP selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga telah dengan sabar memberikan pengarahan, saran, bimbingan, motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.
4. Bapak Drs.R.Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Darmawan Purba, S.I.P, M.I.P selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Ibu Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Mba Sela dan Mas Juni, selaku staf administrasi jurusan yang dengan sabar memberikan pelayanan yang maksimal bagi penulis dan juga jurusan.
8. Bapak Els Syafrie selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran beserta jajaran yang telah membantu penulis memberikan data data yang di butuhkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Warga desa Gunung Rejo dan Bapak Suratno beserta keluarga terimakasih atas bantuan dan masukan dan arahan selama proses pengumpulan data di Desa Gunung Rejo.
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
11. Kedua Orang Tuaku, Bapak Ir. Rozi Hasim dan Ibu Dra. Dian Kagungan, S.H., M.H. terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
12. Untuk Adikku tercinta, Muhammad Faridz Makarim, terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku.
13. Untuk Kakek dan Nenekku, Akram Pasya dan Rohani Yazid, terimakasih untuk dukungan moril nasihat dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini serta selalu mendoakan dan menyemangatiku.
14. Sahabat-sahabat perjuangan Sebujiang : M Ardan Khandari, Alfandre Ridho Utama, Refandho Chonnery, Iqbal T Gani, Jefry Syaiful, Alief Shohibul, M Hamzah Ibrahim, Novaldi Arya, Agung Wira Pradana, Devin Aprilian, Arif Abdurrahman, Alifian Geraldi, Andala Ilham Hatang, Afif Ammar, M Sultan Haidirsyah, Terimakasih selama ini telah berjuang bersama saling support untuk mendapatkan gelar sarjana.
15. Sahabat- sahabat perjuangan di kampus: Erlangga Satria Agung, M Ridho Handika, Abdi Setiawan, Evando Yulisa, Rama Dhesriyan, Humaira Anisya, Dedemas Febriyanti, Mevita Inestia, Restu ana puari, Rahmania tisandi, Dinda Tamarani, Bela Kharisma

16. Almamater tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga ALLAH SWT membalas kebaikan mereka semua dan semoga karya sederhana ini dapat menjadi suatu bacaan yang bermanfaat.  
Amin.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2021  
Penulis,

Muhammad Ridho Makarim  
NPM. 1716021028

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik .....	12
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik .....	12
2.1.2 Proses Kebijakan Publik .....	14
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.....	16
2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan .....	16
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan.....	18
2.3 Tinjauan Tentang Pengembangan Pariwisata.....	24
2.3.1 Konsep Pengembangan Pariwisata .....	24
2.3.2 Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat.....	27
2.3.3 Prinsip-Prinsip, Manfaat, Pendukung dan Penghambat Pariwisata Berbasis Masyarakat .....	28
2.4 Tinjauan Tentang Satu Desa Satu Destinasi Wisata .....	33
2.4.1 Konsep Tentang Desa Wisata .....	33



2.4.2 Tujuan Pembentukan Desa Wisata .....	33
2.4.3 Kriteria dan Persyaratan Desa Wisata.....	34
2.5 Kerangka Pikir .....	35
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Tipe Dan Pendekatan Penelitian .....	37
3.2 Fokus Penelitian .....	38
3.3 Lokasi Penelitian .....	39
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	40
3.5 Informan Penelitian .....	41
3.6 Instrumen Penelitian .....	42
3.7 Teknik Pengumpulan data .....	42
3.8 Teknik Analisis Data .....	43
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	45
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Gambaran Wilayah Kecamatan Way Ratai .....	47
4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Way Ratai .....	47
4.1.2 Kondisi Geografis.....	48
4.1.3 Potensi Wisata .....	48
4.2 Gambaran Wilayah Desa Gunung Rejo.....	50
4.2.1 Sejarah Desa Gunung Rejo.....	50
4.2.2 Visi Dan Misi Desa Gunung Rejo .....	51
4.2.3 Kondisi Geografis Desa Gunung Rejo .....	52
4.2.4 Potensi Wisata Desa Gunung Rejo .....	53
4.2.5 Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa Gunung Rejo.....	54
4.2.6 Lembaga Pemerintahan Desa Gunung Rejo .....	55
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
5.1 Hasil Penelitian.....	56
5.1.1 Ukuran dan Tujuan kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo .....	56

5.1.2 Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo .....	97
5.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo.....	99
5.1.4 Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana dan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo.....	101
5.1.5 Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo.....	103
5.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik Dalam Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo.....	105
5.2 Pembahasan .....	106
5.2.1 Ukuran Dan Tujuan Kebijakan.....	107
5.2.2 Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo .....	114
5.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo .....	117
5.2.4 Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo .....	119
5.2.5 Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo .....	121
5.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik Dalam Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo....	123
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
6.1 Simpulan .....	125
6.2 Saran.....	127

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
1. Desa Wisata Kabupaten Pesawaran <i>One Village One Destination</i> .....	3
2. Potensi Wisata Desa Gunung Rejo....	6
3. Jumlah Pengunjung Objek Wisata Desa Gunung Rejo 2017-2019 .....	7
4. Penelitian Terdahulu .....	8
5. Daftar Dokumen Terkait Dengan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo .....	41
6. Potensi Wisata Alam Kecamatan Way Ratai .....	49
7. Urutan Jabatan Kepala Desa Gunung Rejo .....	51
8. Potensi Wisata di Desa Gunung Rejo .....	53
9. Struktur Pemerintahan Desa Gunung Rejo .....	54
10. Lembaga Pemerintahan Desa Gunung Rejo .....	55
11. Daftar Kegiatan Pelatihan Yang Diikuti Pokdarwis Desa Gunung Rejo .....	59
12. Kunjungan Wisatawan Desa Gunung Rejo.....	66
13. Struktur Organisasi BUMdes Gunung Rejo.....	81
14. Struktur Kepengurusan Pokdarwis Desa Gunung Rejo .....	86
15. Struktur Kepengurusan Karang Taruna Desa Gunung Rejo .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Proses Kebijakan Publik .....	14
2. Kerangka Pikir .....	36
3. Kondisi Jalan Desa Gunung Rejo Sebelum Diperbaiki .....	64
4. Kondisi Jalan Desa Gunung Rejo Sesudah Diperbaiki .....	64
5. Kondisi Lokasi Wisata Ramai Pengunjung Desa Gunung Rejo 2019 .....	66
6. Warung dan Rumah Makan Desa Gunung Rejo .....	67
7. Masjid Desa Gunung Rejo .....	69
8. Mini Pom Bensin Desa Gunung Rejo .....	71
9. Lahan Parkir Wisata Air Terjun Anglo .....	72
10. Warung Jajanan Air Terjun Anglo .....	73
11. Tapak Jalan Air Terjun Anglo .....	74
12. Bendungan Air Terjun Anglo .....	75
13. Pondok-Pondok di Air Terjun Anglo .....	75
14. Mushola Air Terjun Anglo .....	76
15. Toilet di Air Terjun Anglo .....	77
16. BRI Link Desa Gunung Rejo .....	78
17. Trek Motor Trail di Desa Gunung Rejo .....	90
18. Air Terjun di Desa Gunung Rejo .....	90
19. Agrowisata di Desa Gunung Rejo .....	90
20. Perternakan di Desa Gunung Rejo .....	90
21. Pengunjung Area Wisata Gunung Rejo .....	91
22. Pelatihan Dan Sosialisasi Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesiapan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata .....	93

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan pembangunan di segala sektor, terutama di sektor pariwisata, karena Pesawaran merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang besar tentu harus didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti infrastruktur jalan untuk kemudahan akses bagi wisatawan untuk menjangkau tempat tujuan wisatanya. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyediakan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan sebagai akses dalam mengembangkan potensi pariwisata, menjamin rasa aman dan nyaman kepada wisatawan, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui kelompok sadar wisata untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Adanya kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian Putra (2019) penyediaan infrastruktur perlu ditingkatkan lagi sehingga pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran dapat lebih menawarkan beragam obyek wisata yang menarik bagi wisatawan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 320/IV.04/HK/2018 tentang Penetapan Desa Wisata (*One Village One Destination*) yang memiliki makna Pemerintah Kabupaten Pesawaran berusaha mengembangkan Desa-Desa untuk dijadikan sebagai destinasi wisata (satu Desa satu destinasi

wisata) dan langkah kebijakan selanjutnya adalah mendorong agar Desa-Desa di Kabupaten Pesawaran mempunyai keunggulan masing-masing, baik budaya, kerajinan, agrowisata, air terjun dan potensi lainnya yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Dari 148 Desa di Kabupaten Pesawaran saat ini sudah 50 Desa yang mengembangkan destinasi wisata.

Selanjutnya dari 50 Desa yang telah memiliki destinasi wisata tersebut akan dipilih 16 Desa yang berdaya saing dengan destinasi unggulannya, antara lain : Desa Sungai Langka Kecamatan Gedung Tataan terdapat agrowisata, Desa (Pekon) Ampai Kecamatan Marga Punduh mengembangkan destinasi budaya rumah adat, Desa Negeri Katon sebagai Desa sulam tapis, Desa Muncak Kecamatan Teluk Pandan memiliki teropong laut dan mayoritas wisata bahari, Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai memiliki potensi wisata air terjun, agrowisata dan destinasi lainnya. Dalam program *one village one destination* diharapkan dapat menyuguhkan daya tarik wisata sesuai potensi yang dimiliki wilayah tersebut.

Adapun tujuan pembentukan Desa wisata yaitu:

- a. Mendorong penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal dan menjamin adanya akses ke Desa wisata untuk berkembangnya Desa wisata;
- b. mendorong masyarakat setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan kawasan dari penduduk Desa wisata setempat.
- c. Meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan sumber ekonomi.
- d. Meningkatkan promosi Desa.

Meskipun demikian, Pemerintah setempat tetap perlu membenahi infrastruktur (kondisi jalan/akses ke lokasi-lokasi wisata), fasilitas-fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan toko-toko atau gerai-gerai penjual souvenir, fasilitas rumah makan bagi pengunjung, dan sarana pendukung



lainnya termasuk keterlibatan masyarakat lokal. Adanya kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga bertujuan untuk pelestarian sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun, kebijakan penatakelolaan pariwisata Kabupaten Pesawaran masih dirasakan belum maksimal. Potensi wisata Desa-Desa di Kabupaten Pesawaran pada umumnya terkait dengan ekowisata dan wisata pantai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal yaitu peran kelompok sadar wisata, dan di satu sisi masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang ada. Berikut tabel Desa wisata Kabupaten Pesawaran:

**Tabel 1. Desa Wisata Kabupaten Pesawaran *One Village One Destination***

NO.	NAMA	KECAMATAAN	POTENSI DESA
1	Desa Sungai Langka	Gedong Tataan	Agrowisata
2	Desa Wiyono	Gedong Tataan	Air Terjun
3	Desa Berenung	Gedong Tataan	Agrowisata
4	Desa Bogorejo	Gedong Tataan	Air Terjun
5	Desa Gedong Tataan	Gedong Tataan	Sejarah
6	Desa Kedondong	Kedondong	Budaya dan Agrowisata
7	Desa Kertasana	Kedondong	Budaya dan Agrowisata
8	Desa Pulau Pahawang	Marga Punduh	Bahari
9	Desa Pekon Ampai	Marga Punduh	Budaya Rumah Adat
10	Desa Umbul Limus	Marga Punduh	Budaya Rumah Adat
11	Desa Kampung Baru	Marga Punduh	Bahari
12	Desa Negeri Katon	Negeri Katon	Budaya dan Sulam Tapis
13	Desa Ulangan Jaya	Negeri Katon	Sulam Tapis
14	Desa Padang Cermin	Padang Cermin	Wisata Air Panas dan Sungai
15	Desa Durian	Padang Cermin	Wisata Pantai
16	Desa Sukarame	Punduh Pidada	Bahari
17	Desa Pagar Jaya	Punduh Pidada	Bahari dan Pulau
18	Desa Legundi	Punduh Pidada	Bahari dan Pulau
19	Desa Kota Jawa	Punduh Pidada	Budaya
20	Desa Banding Agung	Punduh Pidada	Agro Wisata
21	Desa Batu Raja	Punduh Pidada	Air Terjun dan Situs Budaya
22	Desa Trimulyo	Tegineneng	Danau dan Agrowisata

23	Desa Sidodadi	Teluk Pandan	Bahri
24	Desa Batu Menyan	Teluk Pandan	Bahari dan Air Terjun
25	Desa Sukajaya Lempasing	Teluk Pandan	Bahari
26	Desa Hurun	Teluk Pandan	Bahari
27	Desa Hanura	Teluk Pandan	Bahari, Kerajinan, Kuliner
28	Desa Muncak	Teluk Pandan	Teropong Laut
29	Desa Gebang	Teluk Pandan	Bahari dan Mangrove
30	Desa Talang Mulya	Teluk Pandan	Air Terjun dan Agrowisata
31	Desa Cimanuk	Way Lima	Budaya dan Agrowisata
32	Desa Tanjung Agung	Way Lima	Budaya dan Agrowisata
33	Desa Gedung Dalom	Way Lima	Budaya dan Agrowisata
34	Desa Gunung Rejo	Way Ratai	Air Terjun dan Agrowisata
35	Desa Caringin Asri	Way Ratai	Air Terjun dan Agro Wisata
36	Desa Ponco Rejo	Way Ratai	Air Terjun dan Agro Wisata
37	Desa Wates	Way Ratai	Air Terjun dan Agro Wisata
38	Desa Sumber Jaya	Way Ratai	Air Terjun dan Agro Wisata
39	Desa Harapan Jaya	Way Ratai	Air Terjun dan Agro Wisata
40	Desa Mulyosari	Way Ratai	Air Terjun dan Agro Wisata
41	Desa Bunut Sebrang	Way Ratai	Air Terjun dan Agro Wisata
42	Desa Pesawaran Indah	Way Ratai	Air Terjun dan Agro Wisata
43	Desa Bunut	Way Ratai	Air Terjun dan Agro Wisata
44	Desa Kalirejo	Way Ratai	Air Terjun dan Agro Wisata
45	Desa Karang Anyar	Negeri Katon	Kuliner dan Agrowisata
46	Desa Negeri Sakti	Gedong Tataan	Budaya dan Agrowisata
47	Desa Kebagusan	Gedong Tataan	Agrowisata dan Kuliner
48	Desa Pujo Rahayu	Negeri Katon	Wisata Buatan (TABURA)
49	Desa Kota Jawa	Way Khilau	Aagrowisata dan Kuliner
50	Desa Bayas Jaya	Way Khilau	Air Terjun dan Agrowisata

**(Sumber : Surat keputusan Bupati Pesawaran No.320/IV.04/HK/2018)**

Data yang diperoleh dari hasil pra riset, melalui penjelasan Kepala Bidang Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pesawaran diketahui bahwa Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai menjadi salah satu Desa wisata unggulan non bahari/wisata alam di Kabupaten Pesawaran. Alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Gunung Rejo adalah karena potensi wisata yang dimiliki dan kapasitasnya sebagai daerah pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam. Selain itu juga Desa Gunung Rejo merupakan salah satu dari 10 Desa unggulan yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mensukseskan program *One Village One Destination*.

Hal ini sejalan dengan amanat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 320/IV.04/HK/2018 Tentang Penetapan Desa Wisata (program *one village one destination*, satu Desa satu destinasi wisata) yang artinya setiap Desa harus mampu mengembangkan potensi pariwisata yang di miliki sehingga dapat dijadikan destinasi wisata. Akan tetapi mengingat usia Desa Gunung Rejo yang baru dimekarkan, mengakibatkan perlambatan pengembangan Desa.

**Tabel 2. Potensi Wisata Desa Gunung Rejo**

No	Potensi Wisata	Gambar	Keterangan
1.	Air Terjun Anglo		Dikembangkan kembali
2.	Agrowisata		Dikembangkan Kembali
3.	Peternakan		Dikembangkan kembali
4.	<i>Adventure Trail</i>		Dikembangkan kembali

(Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Gunung Rejo, 2019)

Berikut adalah data jumlah pengunjung obyek wisata Desa Gunung Rejo tahun 2017-2019.

**Tabel 3. Jumlah Pengunjung Objek Wisata Desa Gunung Rejo  
2017-2019**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	3.600 Pengunjung
2.	2018	6.000 Pengunjung
3.	2019	14.230 Pengunjung

(Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Gunung Rejo, 2019)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung wisata Desa Gunung Rejo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (Pra Riset 27 September 2019). Kelompok sadar wisata (pokdarwis) di bentuk dengan tujuan mendukung upaya- upaya mengembangkan wisata, melestarikan budaya, dan mengelola objek wisata yang akan berdampak pada peningkatan hasil pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat (Kemenparekraf, 2012). Pengembangan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat lokal disebut sebagai *Community Based Tourism* (CBT) yang merupakan suatu pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang menekankan pada pelibatan masyarakat lokal (Sunaryo, 2013:139).

Masyarakat lokal tersebut diorganisir ke dalam kelompok-kelompok sadar wisata atau yang biasa disebut pokdarwis. Selanjutnya berdasarkan data dari pra riset yang penulis lakukan di Desa Gunung Rejo dan penelitian yang dilakukan oleh Kagungan, dkk (2017 dan 2019) masalah lemahnya sumber daya manusia, (hampir 60% masyarakat Desa Gunung Rejo mayoritas berpendidikan rendah), tata kelola pariwisata yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal oleh karena masih minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata yang dikelola oleh kelompok sadar wisata, dan di satu sisi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan kelompok sadar wisata Desa Gunung Rejo belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti juga membandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

**Tabel 4. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rizki Aristoni Putra	Analisis Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sudah berhasil menyuguhkan daya tarik kepada wisatawan.
2.	Ayu Lestari	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pariwisata Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Pesawaran	Partisipasi masyarakat Desa Gunungrejo dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pariwisata berjalan dengan baik. Masyarakat ikut andil dalam pembangunan wisata air terjun anglo mulai dari Partisipasi dalam hal buah pikiran serta ide-ide kreatif, partisipasi tenaga, serta partisipasi keterampilan dan keahlian.

*(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021)*

Penelitian mengenai pengembangan Desa wisata telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Rizki Aristoni Putra meneliti mengenai Strategi pengembangan potensi pariwisata di kecamatan teluk pandan kabupaten pesawaran Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sudah berhasil menyuguhkan daya tarik kepada wisatawan. Pada aspek mudah dicapai sudah terlaksana dengan baik pada bagian informasi dan telekomunikasi. Namun, sarana transportasi masih minim dan infrastruktur jalan masih kurang baik sehingga menimbulkan

rasa kurang nyaman pada wisatawan untuk menjangkau objek wisata yang dituju. Pada aspek fasilitas sudah berjalan dengan baik, namun perlu waktu agar program pemerintah dalam aspek fasilitas bisa berjalan secara optimal. Pada aspek lembaga pengelola sudah cukup berhasil, pemerintah pengelola objek wisata dan investor sudah bersinergi dengan baik dalam melakukan strategi pengembangan potensi pariwisata namun perlu ditingkatkan lagi sehingga pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dapat menawarkan beragam objek wisata yang menarik bagi wisatawan.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada kajiannya, yakni penulis mengkaji tentang program *one village one destination* yang merupakan program inovatif pemerintah kabupaten Pesawaran di bidang pariwisata.

2. Ayu Lestari meneliti mengenai Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pariwisata di Desa gunung rejo kecamatan way ratai pesawaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat Desa Gunung rejo dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pariwisata.. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Gunungrejo dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pariwisata berjalan dengan baik. Masyarakat ikut andil dalam pembangunan wisata air terjun anglo mulai dari Partisipasi dalam hal buah pikiran serta ide-ide kreatif, partisipasi tenaga, serta partisipasi keterampilan dan keahlian. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah program ditentukan seberapa besar partisipasi masyarakatnya.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis menganalisis tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang fokus utama nya adalah penerapan kebijakan program *one village one destination* yang merupakan program inovatif pemerintah kabupaten Pesawaran di bidang Pariwisata.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam program *one village one destination* di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam program *one village one destination* di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam program *one village one destination* di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk Mengetahui faktor faktor pendukung dan penghambat pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam program *one village one destination* di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu kebijakan publik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait untuk selalu mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

#### 2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Federick dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dan apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Selain itu, Dye dalam Nugroho (2012:8) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda merupakan pemahaman yang paling banyak dikembangkan. Dikatakannya demikian :

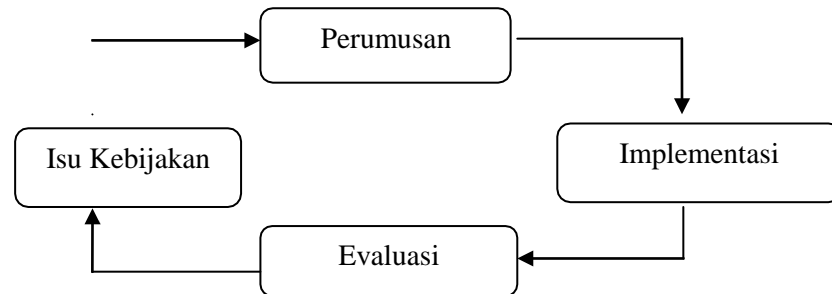
*“Public policy is whatever government choose to do or not to do. Government do many things. Note that we are focusing not only on government action but also on government in action, that is, what government choose not to do. We contend that government in action can have just as great an impact on society as government action. public policy is what government do, what they do it, and what difference it makes.”*

Definisi diatas dapat diartikan kebijakan publik adalah apa saja yang pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Pendapat ini belum cukup memberikan batasan- batasan yang jelas dan tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Seorang pakar politik lain, Rose dalam Winarno (2014:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri”.

Sementara itu, Santoso dalam Winarno (2014:22) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang memiliki arah tindakan dan tujuan serta cara- cara yang ditetapkan oleh sejumlah aktor yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

### 2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Nugroho (2008:114) mengemukakan dasar proses kebijakan sebagai berikut:



**Gambar 1. Bagan Proses Kebijakan Publik**  
(Sumber: Nugroho 2008:114)

Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu *problem* dan *goal*. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada *goal* atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan dari pada antisipasi ke depan, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani.
- b. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.

- c. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat
- d. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- e. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat
- f. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema diatas, terdapat empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan
- b. Implementasi kebijakan
- c. Evaluasi kebijakan dan, dengan penambahan:
- d. Revisi Kebijakan, yang merupakan perumusan kembali kebijakan.

Sebuah isu, baik berupa masalah bersama maupun tujuan bersama, ditetapkan sebagai suatu isu kebijakan. Dengan isu kebijakan ini, dirumuskan dan ditetapkan kebijakan publik. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan atau implementasi kebijakan. Pada saat implementasi dilakukan pemantauan atau monitoring untuk memastikan implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan. Pada saat inilah diperlukan evaluasi kebijakan. Evaluasi yang pertama berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi secara paralel pada implementasi kebijakan, rumusan kebijakan dan lingkungan tempat kebijakan



dirumuskan, diimplementasikan dan berkinerja. Hasil evaluasi menentukan apakah kebijakan dilanjutkan ataukah membawa isu kebijakan yang baru yang mengarah pada dua pilihan: diperbaiki atau revisi kebijakan, ataukah dihentikan, penghentian kebijakan. (Nugroho: 2012).

## **2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan**

### **2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kelompok. Eugene Bardach dalam Agustino (2008:138) menggambarkan kerumitan proses implementasi yaitu: “Membuat sebuah program dan kebijakan publik yang kelihatanya bagus di atas kertas lebih sulit lagi untuk melaksanakanya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang”.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.

Van Horn dan Meter dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah serta swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan tersebut berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut. Definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan mengandung tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan.

Menurut Eugene Bardach dalam Nugroho (2012:140) implementasi kebijakan jauh lebih sulit dibandingkan pada saat formulasi kebijakan. Daniel Mazmanian dan Pual Sabatier lebih fokus pada apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut secara tegas, agar proses pelaksanaannya tidak melenceng dari apa yang setelah ditetapkan. Sedangkan, van Horn dan Van Meter tidak jauh berbeda dengan Daniel Mazmanian, selain proses dan pencapaian tujuan juga melihat kelangsungan dari kebijakan tersebut agar dapat ditransformasikan menjadi pola-pola operasional, intinya bahwa implementasi kebijakan tersebut berkelanjutan.

Paparan berbagai definisi implementasi kebijakan di atas peneliti mengadopsi definisi Van Meter dan Van Horn sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah serta swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan tersebut sesuatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut.

Peneliti mengadopsi definisi tersebut karena yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn lebih jelas dibandingkan dengan definisi yang lain. Pelaksanaan kebijakan pariwisata awalnya secara Nasional yang dilandasi intruksi Presiden kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan di daerah dikeluarkannya instruksi Gubernur dan kegiatan pariwisata. Hal ini sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, setelah adanya keputusan di daerah maka ditransformasikan secara operasional ke dalam kegiatan.

### **2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan, sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Banyak model implementasi kebijakan, pada umumnya model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Beberapa model kebijakan meliputi:

1. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008:144) adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Model ini memiliki tiga variabel, antara lain :
  - a. Mudah atau tidaknya masalah yang digarap, meliputi: kesukaran-

kesukaran teknis, keberagaman perilaku, persentasi totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

- b. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi secara tepat, meliputi: kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketetapan alokasi sumber daya, keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana, aturan- aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang dan akses formal pihak-pihak luar;

Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, meliputi: kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan politik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat serta kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

1. Model Merille Grindle dalam Agustino (2008:154) adalah pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh implementability kebijakan itu seendiri, meliputi:
  - a. *Content of policy* meliputi: kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumber daya yang digunakan;
  - b. *Context of policy* meliputi: kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat, karakteristik lembaga-lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya

respon dari pelaksana.

2. Model George C. Edward dalam Agustino (2008:149-154) terdapat empat variabel meliputi :
  - a. Komunikasi meliputi : transmisi, kejelasan, konsistensi;
  - b. Sumber daya meliputi : staf, informasi, wewenang dan fasilitas;
  - c. Disposisi meliputi: pengangkatan birokrat, insentif; dan
  - d. Struktur birokrasi.
  
3. Model yang terakhir adalah model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang akan peneliti adopsi menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Peneliti memilih model ini, karena adanya kesesuaian variabel-variabel model ini dengan komponen kunci implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Alasan peneliti mengadopsi variabel-variabel tersebut, karena variabel-variabel yang ada pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan komponen kunci implementasi kebijakan pengembangan pariwisata memiliki esensi yang sama. Selain itu ada variabel yang tidak perlu dimunculkan pada saat membuat komponen-komponen yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, karena komponen tersebut akan muncul pada saat wawancara atau riset.
  
4. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2012:150) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: adanya tujuan dan sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

mengandalkan implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Implementasi ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan pelaksanaan, antara lain:

#### 1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Selain itu, sebagai penentu arah pelaksanaan kegiatan atau sebagai batasan dan fokus agar tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Ukuran dan tujuan kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang kepariwisataan. Standar dan tujuan kebijakan di daerah dapat dilihat dari tindak lanjut peraturan tersebut dengan membuat program pengembangan pariwisata tersebut harus memiliki standar dan tujuan yang jelas. Ukuran dan tujuan suatu kebijakan, program, kegiatan yang jelas maka akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Tetapi akan sebaliknya, jika standar dan tujuan dari suatu kebijakan tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan pencapaiannya dan sering mengalami kegagalan dalam mencapai standar dan tujuan tersebut.

#### 2. Sumber daya

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manusia menuntut adanya kualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan disamping kuantitas yang memadai. Tapi, jika kualitas dari sumber daya manusia tersebut rendah, maka keberhasilan implementasi kebijakan publik akan sulit untuk dicapai. Sumber daya manusia mengacu pada seluruh staf bidang destinasi dan pemasaran pariwisata dinas kebudayaan, pariwisata pemuda dan olah raga Kabupaten Pesawaran

dan *stakeholders* yang terkait. Kemudian, fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berupa anggaran dan data terpilah.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini mengacu pada koordinasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dengan *stakeholders* terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten Pesawaran.

4. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri agen pelaksananya.

5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ini mengacu pada sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Dukungan politik dapat dilihat melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung.

6. Sikap/kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi kebijakan warga setempat yang memahami permasalahan di area tersebut.

Keunggulan model ini dapat menawarkan kerangka berfikir untuk menjelaskan dan menganalisa proses implementasi kebijakan dan memberikan penjelasan- penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan kegagalan program. Model ini menitikberatkan pada sikap, perilaku dan kinerja para pelaku di dalam implementasi kebijakan. Paparan berbagai definisi implementasi kebijakan di atas peneliti mengadopsi definisi Van Meter dan Van Horn sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah serta swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan tersebut sesuatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut.

Peneliti mengadopsi definisi tersebut karena yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn lebih jelas dibandingkan dengan definisi yang lain. Implementasi kebijakan pariwisata awalnya secara nasional yang dilandasi intruksi presiden kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan di daerah dikeluarkanya instruksi Gubernur dan kegiatan pariwisata. Hal ini sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, setelah adanya keputusan di daerah maka ditransformasikan secara operasional ke dalam kegiatan.



## 2.3 Tinjauan Tentang Pengembangan Pariwisata

### 2.3.1 Konsep Pengembangan Pariwisata

Menurut Pitana (2005:56), pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Sedangkan terkait pariwisata yaitu sejak 6 Agustus 1969 dari awal pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden R.I No. 9 Tahun 1969 dimana dalam Bab II pasal 3 disebutkan:

“Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan “industri pariwisata” dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara”.

Sesuai dengan instruksi presiden tersebut, dikatakan pula bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan kerja serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya
- b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia
- c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata pasal 11 yang menjadi acuan dalam

pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada kriteria:

- a. Aksesibilitas
- b. Amenitas/fasilitas
- c. *Ancillary*/kelembagaan
- d. Daya tarik wisata
- e. Kesiapan masyarakat
- f. *Era/trend* yang berkembang

Menurut Hadinoto dalam Musanef (1996: 60) ada beberapa hal yang menentukan dalam pengembangan suatu obyek wisata, diantaranya adalah:

- a. Atraksi Wisata

Atraksi merupakan daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.

- b. Promosi dan Pemasaran

Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting.

- c. Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata)

Pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum/ tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

- d. Transportasi

Pendapat dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.

- e. Masyarakat Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan).

Menurut Suwanto dalam Musanef (1996:70), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi:

- a. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada :

- 1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- 2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- 3) Adanya spesifikasi/ ciri khusus yang bersifat langka.
- 4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan;
- 5) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain- lain).
- 6) Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

- b. Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

- c. Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati

perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

Keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh 3 faktor, seperti yang dikemukakan oleh Yoeti (1996:165), sebagai berikut :

- a. Tersedianya objek dan daya tarik wisata.
- b. Terjadinya fasilitas tempat wisata yaitu sasaran kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat termasuk akomodasi, restoran, rekreasi, dll.
- c. Adanya fasilitas *accessibility* yaitu sarana dan prasarana, sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.

### **2.3.2 Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Musanef (1996:100) menyatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat disebut sebagai *community based tourism* (CBT). Pariwisata berbasis masyarakat merupakan kepariwisataan yang umumnya diselenggarakan dalam skala kecil dimana di dalamnya terjadi interaksi antara pengunjung dan masyarakat tuan rumah. Pariwisata berbasis masyarakat biasanya lebih cocok untuk diterapkan di daerah pedesaan, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat lokal dan untuk masyarakat lokal, dengan mengedepankan penyedia pelayanan pariwisata lokal dan berfokus pada budaya dan lingkungan sebagai daya tariknya.

Hausler and Strasdas dalam Kusudianto (1996) menyatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan sejenis kepariwisataan yang perkembangan dan pengelolaannya dikontrol oleh masyarakat lokal, dimana bagian terbesar dari manfaat yang dihasilkan kepariwisataan tersebut dinikmati oleh masyarakat lokal, baik yang terlibat secara

langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan tersebut, serta memberikan pendidikan bagi pengunjung maupun masyarakat lokal mengenai pentingnya usaha konservasi terhadap alam dan budaya.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan definisi operasional dari konsep “pariwisata berbasis masyarakat” yaitu suatu bentuk kepariwisataan yang mengedepankan kepemilikan dan peran serta aktif masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat lokal maupun pengunjung, mengedepankan perlindungan kepada budaya dan lingkungan, serta memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat lokal.

### **2.3.3 Prinsip-prinsip, Manfaat, Pendukung dan Penghambat Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Menurut Hausler dan Strasdas dalam Kusudianto (1996:120) Pariwisata berbasis masyarakat merupakan sejenis kepariwisataan yang perkembangan dan pengelolaannya dikontrol oleh masyarakat lokal, dimana bagian terbesar dari manfaat yang dihasilkan kepariwisataan tersebut dinikmati oleh masyarakat lokal baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan tersebut. Pariwisata berbasis masyarakat memiliki beberapa karakteristik yaitu adanya pendidikan dan interpretasi sebagai bagian dari produk wisatanya, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan pengunjung terhadap pentingnya upaya konservasi, umumnya diperuntukkan bagi wisatawan dalam jumlah kecil oleh usaha jasa yang dimiliki masyarakat lokal, meminimalisir dampak negatif terhadap alam dan lingkungan sosial-budaya dan mendukung upaya perlindungan terhadap alam.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan prinsip-prinsip dari konsep pariwisata berbasis masyarakat yaitu prinsip partisipasi masyarakat, prinsip pendidikan (edukasi), prinsip konservasi alam, prinsip

konservasi budaya, dan prinsip ekonomi lokal. Jika diimplementasikan dengan baik, pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui keuntungan usaha dan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, memulihkan kondisi ekonomi dan memperbaiki infrastruktur. Pariwisata berbasis masyarakat bahkan mendukung efektifitas ekonomi lain baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Selain itu, pariwisata berbasis masyarakat dapat membangun jejaring antara sektor yang terkait dan menciptakan pasar untuk produk wisata yang telah disiapkan, berkontribusi untuk menyeimbangkan pembangunan, menyediakan keragaman ekonomi, menghapus ketergantungan ekonomi terhadap sektor tertentu, meratakan distribusi kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh penghasilan.

Bidang sosial-budaya, pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kualitas SDM lokal dalam program pelatihan dan pendidikan, mendukung organisasi masyarakat lokal dalam hal meningkatkan kapasitas, membangun jejaring dan keterlibatan mereka dalam pengembangan pariwisata di daerahnya dan memungkinkan terciptanya tata kelola kepariwisataan yang baik melalui keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan di segala tingkatan.

Pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan kebanggaan mereka terhadap daerah dan budayanya, meningkatkan kerukunan, memberdayakan masyarakat dan menciptakan persamaan sosial, mengurangi emigrasi dan memicu imigrasi. Pariwisata berbasis masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, meningkatkan tingkat kesehatan melalui perbaikan sanitasi dan sistem pengelolaan limbah, fasilitas umum dan infrastruktur (air, listrik dan telekomunikasi), menjaga dan mempromosikan budaya lokal, tempat bersejarah, dan alam melalui

peningkatkan kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya konservasi serta menyediakan dukungan dana yang dihasilkan dari keberadaan kepariwisataan di suatu daerah. Pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan hubungan dan jejaring antar budaya melalui pertukaran budaya dan dialog antara masyarakat lokal dan wisatawan.

Menurut Tasci et al dalam Musanef (1996:130) manfaat pariwisata berbasis masyarakat terhadap lingkungan adalah dapat mendorong pemanfaatan berkelanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang sensitif, menghindari eksploitasi dan ketergantungan terhadap satu sumber daya, mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara tidak konsumtif, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan di tingkat nasional dan lokal, serta meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antara lingkungan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berbasis masyarakat dengan baik, kondisi yang mendukung sangat dibutuhkan Tasci et al dalam Musanef (1996:131) menyatakan bahwa kegagalan program pariwisata berbasis masyarakat di antaranya diakibatkan oleh ketidakmampuan program tersebut menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketidakmampuan tersebut pada dasarnya berpankhal dari ketidakmampuan masyarakat pelaksana program untuk memastikan diperolehnya manfaat baik dari penguasaan lahan, kurangnya kemampuan dalam hal pengelolaan, termasuk pemasaran dan keterampilan wirausaha, kurangnya keterlibatan masyarakat, kurangnya rasa memiliki masyarakat, serta kesulitan dalam hal pendanaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Asker et al dalam Musanef (1996:132) menyatakan bahwa agar pariwisata berbasis masyarakat dapat

diterapkan dengan baik, dibutuhkan suatu pre-kondisi bahwa kesamaan visi di antara anggota masyarakat merupakan syarat penerapan pariwisata berbasis masyarakat, karena kesamaan visi dapat memunculkan aspirasi untuk menerapkan pariwisata berbasis masyarakat dan pada akhirnya menentukan pula tingkat partisipasi mereka. Kesamaan visi ini akan tercapai apabila masyarakat telah bersatu dan terorganisir, yang artinya bahwa usaha penyamaan visi serta faktor kepemimpinan untuk menunjang koordinasi sangat dibutuhkan.

Selain kesamaan visi seluruh anggota masyarakat, kemampuan menghasilkan rencana pengembangan yang tepat juga sangat dibutuhkan. Rencana tersebut harus disusun dengan mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dan memungkinkan masyarakat terlibat dalam program tersebut. Rencana tersebut juga harus mempertimbangkan aspek pemasaran sehingga keberlanjutan program tersebut dapat di maksimalkan. Dengan demikian, masyarakat akan memperoleh manfaat dari program tersebut sehingga pada akhirnya akan semakin memunculkan kesadaran dan upaya untuk melestarikan sumber daya baik alam/lingkungan, maupun sosial budaya yang menjadi daya tarik utama program pariwisata berbasis masyarakat mereka.

Satu hal yang sangat penting juga mengenai rencana penerapan pariwisata berbasis masyarakat menurut Asker et al bahwa rencana tersebut harus terintegrasi dengan rencana pengembangan yang lebih luas di suatu daerah sehingga dukungan dari berbagai pemangku kepentingan khususnya pemerintah sangat diperlukan. Dukungan tersebut akan dapat terwujud apabila ada usaha untuk senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah sehingga tercipta sinergi yang baik dan juga dengan pemangku kepentingan lainnya.



### 2.3.4 Pengembangan Pariwisata di Desa Gunung Rejo

- a. Analisis pengembangan kawasan wisata Desa Gunung Rejo meliputi pada aspek :
  - Obyek dan daya tarik wisata
  - Fasilitas penunjang wisata
  - Infrastruktur
  - Lingkungan
  - Pasar/pemasaran
  - Tata ruang
  
- b. Analisis kelayakan pengembangan kawasan wisata Desa Gunung Rejo mencakup :
  - Analisis kelayakan teknis
  - Analisis kelayakan pasar
  - Analisis kelayakan manajemen pengelolaan
  - Analisis kelayakan investasi
  
- c. Arahana pengembangan fisik kawasan wisata unggulan Desa Gunung Rejo, mencakup didalamnya :
  - Strategi dan konsep pengembangan dan perencanaan tata ruang kawasan wisata Desa Gunung Rejo (*policy and concept of site planning*)
  - Perumusan fungsi kegiatan/ fasilitas yang akan diwadahi
  - Rencana tapak kawasan wisata unggulan, berupa gambaran rencana spasial (keruangan)
  - Rencana pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana

## **2.4 Tinjauan Tentang Satu Desa Satu Destinasi Wisata (*One Village One Destination*)**

### **2.4.1 Konsep Tentang Desa Wisata**

Desa wisata adalah kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang Desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

*(Sumber : Peraturan Bupati Pesawaran Tahun 2019 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1)*

### **2.4.2 Tujuan Pembentukan Desa Wisata**

Pembentukan destinasi Desa wisata merupakan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh terhadap unsur Daya Tarik Wisata (DTW) Alam, Budaya dan buatan manusia, dengan tujuan:

- a. Mendorong penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal dan menjamin adanya akses ke Desa wisata untuk berkembangnya Desa wisata;
- b. Mendorong masyarakat setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan kawasan dari penduduk Desa wisata setempat.
- c. Meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan sumber ekonomi;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, budaya dan sosial;

- e. Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia warga masyarakat Desa wisata;
- f. Secara non ekonomis dapat menguatkan citra Desa dan budaya masyarakat.
- g. Mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan,saling interaksi dengan wisatawan;
- h. Mendorong perkembangan kewirausahaan dibidang usaha pariwisata masyarakat;
- i. Meningkatkan promosi Desa.

*(Sumber : Peraturan Bupati Pesawaran Tahun 2019 BAB II Tujuan Pembentukan Desa Wisata Pasal 2)*

#### **2.4.3 Kriteria dan Persyaratan Desa Wisata**

- a. Aksesibilitas baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi;
- b. Memiliki obyek-obyek wisata menarik diantaranya berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai kesatuan suatu obyek wisata;
- c. Masyarakat dan aparat Desa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Desa wisata serta para wisatawan yang datang ke Desanya;
- d. Harus memenuhi unsur-unsur sapta pesona (aman, tertib,bersih,sejuk,indah,ramah,dan kenangan)
- e. Tersedianya sarana dan prasarana (transportasi,SDM, Home stay, dan bangunan fasilitas penunjang) yang memadai;
- f. Obyek yang masih asli dan asri;
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas;

*(Sumber : Peraturan Bupati Pesawaran Tahun 2019 BAB III Bagian Kedua Kriteria Dan Persyaratan Desa Wisata Pasal 4)*

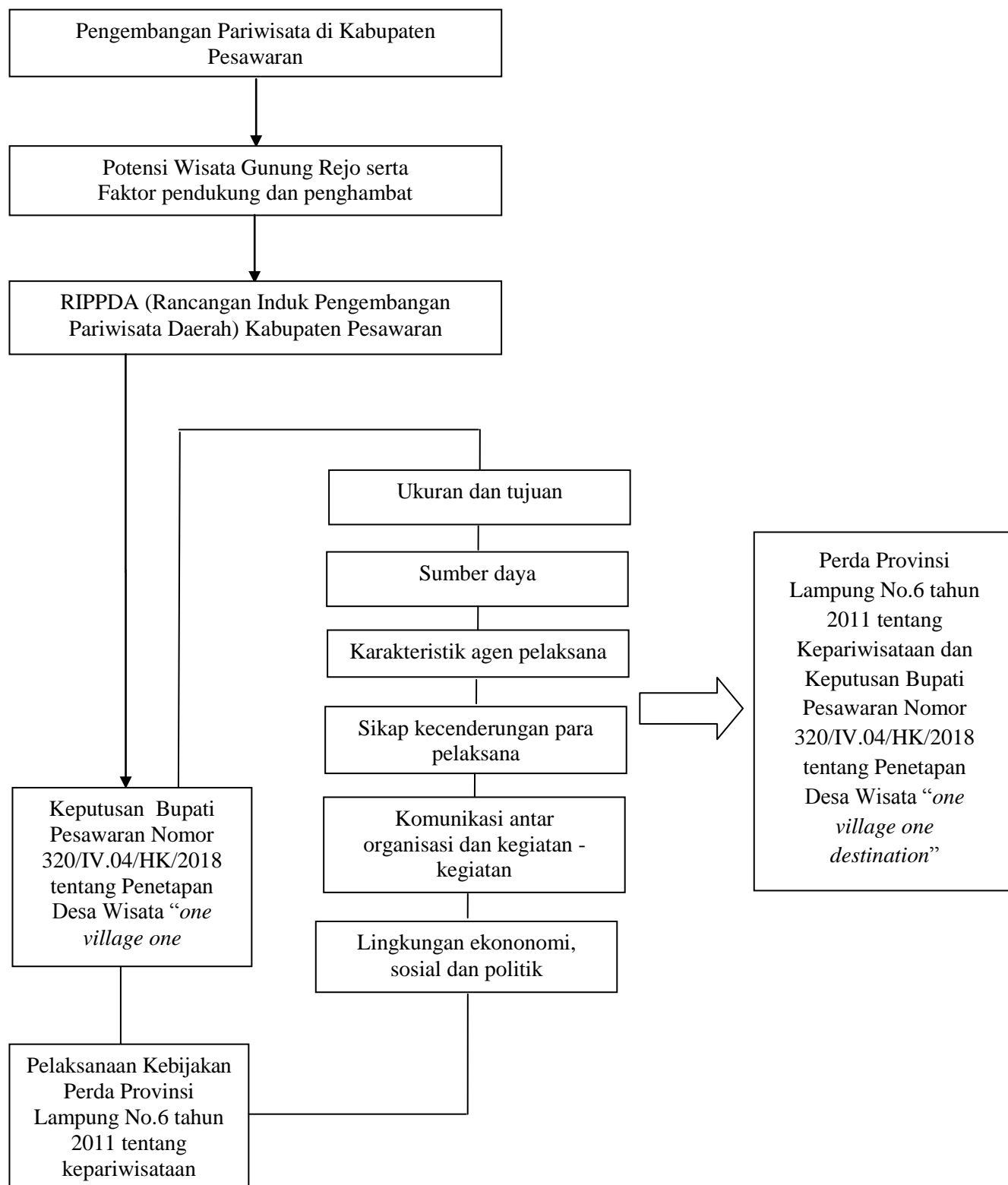
## 2.5 Kerangka Pikir

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang menjadi salah satu sektor perekonomian yang penting bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini mendorong setiap pemerintah daerah dan pelaku usaha tertarik untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi pariwisata. Pada era otonomi ini diharapkan pembangunan pariwisata dapat mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara untuk membangun masyarakat adil dan makmur, terutama bagi masyarakat di wilayah pengembangan pariwisata seperti yang dilakukan Kabupaten Pesawaran.

Adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata sebagai dasar dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 320/IV.04/HK/2018 tentang Penetapan Desa Wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran masih dirasakan belum maksimal dilaksanakan. Permasalahan pariwisata di Provinsi Lampung saat ini adalah tatakelola pariwisata di Kabupaten/Kota masih cenderung berjalan sendiri-sendiri dan belum memiliki tema sentral yang layak jual, untuk itu Kabupaten Pesawaran telah mengeluarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 320/IV.04/HK/2018 tentang Penetapan Desa Wisata “*one village one destination*” satu Desa satu destinasi wisata.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan meneliti kebijakan pengembangan pariwisata di Kecamatan Way Ratai tepatnya di Desa Gunung Rejo yang diukur melalui enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yakni model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu : Ukuran dan tujuan, Sumber daya, karakteristik agen pelaksana, Sikap kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan kegiatan, Lingkungan Ekonomi sosial dan politik.

Berikut ini merupakan kerangka pikir penelitian:



**Gambar 2. Kerangka Pikir**  
(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021)

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan fenomena sosial yang ada dalam Analisis Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran . Menurut Nazir (1983:54) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membantu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tujuan dilakukannya penelitian deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi bagaimana pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran bisa memberikan manfaat untuk masyarakat yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang pariwisata agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Spradley dalam Sugiono (2009:208) menyatakan bahwa *A focused refer to a single cultural domain or d few related domains* maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial.

Fokus masalah diturunkan dari rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada : pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kecamatan Way Ratai tepatnya di Desa Gunung Rejo yang diukur melalui enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yakni model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, variabel tersebut yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Apakah tujuan pengembangan pariwisata sudah realistis untuk dilaksanakan pada masyarakat dan apakah para pelaksana sudah mengerti betul terhadap ukuran dan tujuan dari pengembangan pariwisata ini.

2. Sumber daya

Sumber daya dalam hal ini yaitu ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3. Karakteristik agen pelaksana

Bagaimana para agen pelaksana pengembangan pariwisata bisa mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan dan apakah agen yang dilibatkan sudah sesuai dengan cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan. Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal.

4. Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana  
Bagaimana sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana yang akan mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi pengembangan pariwisata.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana  
Koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi pengembangan pariwisata.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik  
Lingkungan eksternal dari kebijakan ini, yaitu dengan memperhatikan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang akan turut mendorong keberhasilan pengembangan pariwisata.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Moloeng (2005:86) lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data- data penelitian yang akurat.

Lokasi yang telah dijadikan penelitian ini adalah di Kabupaten Pesawaran tepatnya di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan Desa Gunung Rejo (termasuk kelompok sadar wisata /pokdarwis Desa Gunung Rejo). Alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Gunung Rejo adalah karena potensi wisata dan kapasitasnya sebagai daerah pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam.

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran khususnya Kecamatan Way Ratai (Desa Gunung Rejo) yang cukup pesat dengan memiliki pengunjung potensial yang cukup banyak dan Desa tersebut sedang menghadapi persaingan sebagaimana yang dialami oleh daerah pariwisata



lainnya. Oleh karenanya, dengan melihat dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, dapat diketahui upaya pencapaian keberhasilan pengembangan pariwisata yang terdapat di Desa Gunung Rejo yang berasal dari belum optimalnya upaya pengembangan pariwisata dan kemudian mengidentifikasinya untuk dilakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka mempertahankan daya tarik wisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran merupakan institusi yang mengetahui tentang program pengembangan pariwisata di Desa Gunung Rejo dan merupakan salah satu tempat pengimplementasi program pengembangan pariwisata serta memiliki kelompok sadar wisata yang secara umum belum berfungsi secara optimal. Di satu sisi kelompok sadar wisata merupakan ujung tombak pengembangan pariwisata di tingkat Desa.

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam dan observasi tentang analisis kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran.
2. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran tepatnya di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Kabupaten Pesawaran dan di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai . Adapun informan yang akan saya wawancarai yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Pesawaran, Kepala Desa Gunung Rejo, Sekretaris Desa Gunung Rejo, Ketua Pokdarwis Desa Gunung Rejo, Ketua Karang Taruna, Penggiat Keliling Lampung.

#### 1. Peristiwa Atau Kejadian

Peristiwa atau kejadian adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pernah terjadi terkait dengan pelaksanaan pengembangan pariwisata di Gunung Rejo.

#### 2. Dokumen-Dokumen

Dokumen adalah arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunung Rejo.

**Tabel 5. Daftar Dokumen Terkait Dengan Pengembangan Pariwisata Di Desa Gunung Rejo**

No.	Dokumen
1.	Renstra Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2012- 2031
2.	Profil Kabupaten Pesawaran dan Desa Gunung Rejo
3.	RIPPPDA Kabupaten Pesawaran
4.	Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 320/IV.04/HK/2018 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran (program Satu Desa Satu Destinasi Wisata “ <i>One Village One Destination</i> ”)
5.	Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
6.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2011 tentang Kepariwisata

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021)

### 3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti, yaitu menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Seperti yang dikemukakan oleh Licoln dan Gubs juga Nasution dalam Sugiyono (2009:222) yang menyatakan bahwa yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.
2. Perangkat penunjang lainnya seperti pedoman wawancara dan catatan-catatan lapangan dan alat bantu yang lain seperti kamera, perekam, buku, pena, dll.

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009:226) observasi adalah dasar semua pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat berkerja berdasarkan data yaitu mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kendala-kendala dalam penganggaran dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan pengembangan pariwisata sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar wisata.

## 2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiono (2009:231) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

## 3. Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246) terdapat tiga komponen analisis data yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dari data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berjalan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh lalu difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunung Rejo.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

### 3.9 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009:267) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

#### 1. *Credibility*/Kepercayaan

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif. Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.

#### 2. *Transferability*/Keteralihan

Dalam membuat laporannya, peneliti harus memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

### 3. *Dependability*/Kebergantungan Atau Reliabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

### 4. *Konfirmability*/Kepastian

Uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Wilayah Kecamatan Way Ratai**

#### **4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Way Ratai**

Kecamatan Way Ratai merupakan pemekaran dari kecamatan Padang Cermin. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2007 Tanggal 12 Juli 2007 Kecamatan Padang Cermin menjadi wilayah Kabupaten Pesawaran hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Seiring dengan perjalanan waktu Kabupaten Pesawaran memekarkan Kecamatan Padang Cermin menjadi Kecamatan Way Ratai, dasar pembentukan Kecamatan Way Ratai Perda Nomor: 12 Tahun 2014 Tanggal 20 Oktober 2014 dengan Camat Pertama Drs. IHSAN BASRI dan Ibukota di Kecamatan Desa Wates Way Ratai. Adapun Kecamatan Way Ratai terdiri dari :

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Desa Bunut           | 7. Desa Ceringin Asri       |
| 2. Desa Mulyo Sari      | 8. Desa Pesawaran Indah     |
| 3. Desa Bunut Seberang  | 9. Desa Sumber Jaya         |
| 4. Desa Poncorejo       | 10. Desa Harapan Jaya       |
| 5. Desa Wates Way Ratai | 11. Desa Persiapan Kalirejo |
| 6. Desa Gunung Rejo     |                             |



#### 4.1.2 Kondisi Geografis





Luas Wilayah pemerintahan Kecamatan Way Ratai adalah 10.503,78 Ha, yang terbagi dalam berbagai peruntukan seperti perkebunan dengan luas 4.088 Ha, Sawah 568 Ha, Ladang 568 Ha, Perkarangan 523 Ha, dan lain-lain 4.529,78 Ha. Kecamatan Way Ratai memiliki ketinggian 80 sampai 1.437 M.dpl dengan suhu minimal 26°C dan suhu tertinggi 35°C. Kecamatan Way Ratai memiliki curah hujan 6 bulan hujan dengan jumlah hari hujan terbanyak 26 hari dan debit curah hujan 3.500 mm/Thn. Keadaan geografis kecamatan Way Ratai adalah berbukit dan gunung. Adapun Kecamatan Way Ratai berbatasan dengan yaitu:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan kawasan hutan Register 19.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelumbayan Barat Tanggamus.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Way Khilau.

#### 4.1.3 Potensi Wisata

Keadaan geografis dan bentuk kontur Kecamatan Way Ratai adalah pegunungan dan bukit. Keadaan ini menyebabkan di Kecamatan Way Ratai Banyak dialiri sungai dan berpotensi untuk dijadikan objek wisata. Kecamatan Way Ratai banyak terdapat air terjun, hampir semua Desa di Kecamatan Way Ratai memiliki air terjun yang berpotensi dijadikan objek Pariwisata. Berikut beberapa air terjun yang terdapat di Kecamatan Way Ratai :

**Tabel 6. Potensi Wisata Alam Kecamatan Way Ratai**

No	Nama Air Terjun	Gambar
1.	Air Terjun Anglo Gunung Rejo	
2.	Air Terjun kembar Ceringin Asri	
3.	Air Terjun Ciupang Sumber Jaya	
4.	Air Terjun Banyu Mandiri Pesawaran Endah	

5.	Air Terjun Sinar Tiga Harapan Jaya	
6.	Air Terjun Rindu Alam Kalirejo	

(Sumber: Dokumentasi Pemerintah Kecamatan Way Ratai, 2020)

## 4.2 Gambaran Wilayah Desa Gunung Rejo

### 4.2.1 Sejarah Desa Gunung Rejo

Gunung Rejo awalnya merupakan salah satu pedukuhan di wilayah Desa Wates Way Ratai yang dikenal dengan nama ANGLO (nama *Afdeling* wilayah kerja perkebunan karet kopi Way Ratai), meliputi dusun Totoharjo dan Dusun Gunungrejo. Pada sekitar pertengahan tahun tepatnya pada 23 Oktober 1986 Desa Gunung Rejo resmi dimekarkan dari Desa Wates menjadi Desa Persiapan Gunung Rejo yang terdiri dari dua belas (12) Dusun, antara lain: Kalipasir I, Kalipasir II, Gunung Rejo, Kaliawi, Fajarbulan, Gunungsari, Lebaksari, Tamansari, Totoharjo, Merawan, Sidorejo dan Candipuro.

Pada tahun 1990, Kepala Desa Gunung Rejo dijabat oleh penjabat sementara, yaitu Bapak Samsuri pada tahun 1991 Desa Persiapan

Gunung Rejo ditetapkan menjadi Desa definitif dengan nama Desa Gunung Rejo. Setelah terjadinya pemekaran Desa, saat ini Desa Gunung Rejo terbagi atas 9 dusun yaitu Dusun Kalipasir, Dusun Ngadirejo, Dusun Gunungrejo 1, Dusun Gunungrejo II, Dusun Kaliawi, Dusun Candisari I, Dusun Candisari II, Dusun Tegalrejo, Dusun Talangbandung. Kemudian Pada tahun 2014, Kecamatan Padang Cermin dimekarkan menjadi tiga kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran, dan saat ini Desa Gunung Rejo terletak di wilayah Kecamatan Way Ratai.

Adapun kepala Desa yang pernah dan sedang menjabat di Desa Gunung Rejo yaitu tersaji pada table berikut:

**Tabel 7. Urutan Jabatan Kepala Desa Gunung Rejo**

No	Nama Kepala Desa	Tahun Kepemerintahan
1.	Basnu. MS	1986 – 1990
2.	Samsuri	1990 – 1992
3.	Suwardi	1992-1994
4.	Mulyanto	1994-2002
5.	Rudi Agus Sunandar	2002-2008
6.	Suranto, ST	2009-Sekarang

*(Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Gunung Rejo, 2020)*

#### 4.2.2 Visi, Misi Desa Gunung Rejo

Pada masa kepemimpinan Bapak Suranto beserta jajarannya, Desa Gunung Rejo memiliki visi “Gunung Rejo Sejahtera dan Mandiri” yang dituangkan dalam misi nya yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan pola pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perdagangan sesuai dengan usaha masyarakat dan potensi Desa.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan dan pelatihan kelompok dan lembaga kemasyarakatan.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat dari usia dini.
- 5) Meningkatkan kehidupan sosial, seni budaya, pemuda dan olah raga dalam bingkai kearifan lokal
- 6) Membangun kemandirian Desa dengan menggali dan mengembangkan potensi dan usaha Desa.
- 7) Menciptakan Gunungrejo yang sejuk, nyaman, indah, asri dan bersahaja.

#### **4.2.3 Kondisi Geografis Desa Gunung Rejo**

Desa Gunung Rejo Terdiri dari dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 400-500 dpl, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Hutan Kawasan
- b. Sebelah selatan : Desa Poncorejo
- c. Sebelah barat : Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong
- d. Sebelah timur : Desa Mulyosari

Sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:



- a. Ke ibu kota kabupaten : 70 Km
- b. Ke ibu kota propinsi : 100 Km

Desa Gunung Rejo yang tumbuh jauh dari pusat kota dalam perjalanan pemerintahannya memiliki karakteristik potensi perekonomian yang cukup baik di bidang pariwisata dan hasil pertanian.

#### 4.2.4 Potensi Wisata Desa Gunung Rejo

Desa Gunung Rejo dianugerahi bentuk kontur pegunungan, sehingga hal ini menjadikan Desa Gunung Rejo kaya akan potensi wisata. Akan tetapi mengingat usia Desa Gunung Rejo yang baru dimekarkan, mengakibatkan perlambatan pengembangan Desa. Hal ini berdampak pada potensi wisata yang belum dikembangkan. Berikut terdapat potensi wisata yang sedang dan belum dikembangkan yaitu:

**Tabel 8. Potensi Wisata di Desa Gunung Rejo**

No	Potensi Wisata	Gambar	Keterangan
1.	Air Terjun Anglo		Sedang dikembangkan
2.	Agrowisata		Belum dikembangkan

3.	Peternakan		Belum dikembangkan
4.	<i>Adventure Trail</i>		Belum dikembangkan

(Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Gunung Rejo, 2020)

#### 4.2.5 Struktur Birokrasi Pemerintah Desa Gunung Rejo

Struktur birokrasi pemerintah Desa Gunung Rejo, sebagai berikut:

**Tabel 9. Struktur Pemerintahan Desa Gunung Rejo**

No.	Nama	Jabatan
1.	Kepala Desa	Suranto
2.	Sekretaris Desa	Munardi
3.	Bendahara Desa	Mangihup Togatorop
4.	Kaur Pemerintahan	Andri Suryawan
5.	Kaur Umum	Nano Suparno
6.	Kaur Kesejahteraan Rakyat	Eko Yuliono
7.	Kaur Pembangunan	Sutikno

(Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Gunung Rejo, 2020)

#### 4.2.6 Lembaga Pemerintah Desa Gunung Rejo

Pemerintah Desa Gunung Rejo untuk mewujudkan visi dan misi nya maka dibentuk lembaga pemerintah Desa guna memenuhi kebutuhan sarana pembangunan Desa, sebagai berikut:

**Tabel 10. Lembaga Pemerintah Desa Gunung Rejo**

No	Nama Lembaga	Nama Ketua
1.	BPD ( Badan Permusyawaratan Desa)	Sanarak
2.	LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	M.Praptu
3.	Karang Taruna	Rolli Ekianto
4.	PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)	Evi Septiana
5.	BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)	Suratno
6.	Kelompok Pengguna Air	Suprpto
7.	LINMAS (Perlindungan Masyarakat)	Idwar Husein
8.	Koperasi	Sutrisno
9.	POLMAS (Perpolisian Masyarakat)	Hargo
10.	POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)	Hartono

*(Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Gunung Rejo, 2020)*



## **VI. PENUTUP**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunung Rejo yang diukur melalui enam indikator yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik antara lain:

1. Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan sudah berhasil, Para pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata ini sudah cukup memahami ukuran dan tujuan kebijakan dari kebijakan ini. Pemahaman mereka sudah seragam yaitu menjaga alam agar tetap lestari dan menyejahterakan masyarakat, bukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Walaupun dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung tujuan pengembangan pariwisata di Propinsi Lampung adalah sebagai bagian dalam mewujudkan dan mengisi pola pembangunan pariwisata nasional serta sebagai suatu kegiatan ekonomi dan sumber pendapatan pemerintah. Pelaksanaan secara teknis dalam pengembangan pariwisata juga merupakan bagian dari ukuran dan tujuan kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan sudah mampu melaksanakan pengembangan pariwisata secara teknis, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata.
2. Indikator sumber daya masih kurang dikarenakan ketersediaan SDM yang handal terhadap para agen pelaksana namun di sisi lain terdapat ketercukupan sumber daya finansial.

3. Indikator karakteristik agen pelaksana sudah berhasil, para agen pelaksana kebijakan sudah memusatkan perhatian kepada masyarakat dan alam.
4. Indikator sikap/kecenderungan agen pelaksana sudah berhasil, para agen pelaksana sudah sepakat menolak swasta dalam pengelolaan pariwisata di Desa Gunung Rejo dan mengembangkan pariwisata Desa Gunung Rejo sesuai era/trend yang berkembang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan.
5. Indikator Komunikasi belum berhasil, komunikasi yang terjalin selama ini belum optimal karena belum adanya forum pertemuan dan laporan resmi antar agen pelaksana kebijakan.
6. Indikator lingkungan sosial,ekonomi,politik sudah berhasil, lingkungan politik dirasa bersih dan mendukung, dari segi ekonomi sudah adanya ketercukupan modal usaha dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi kreatif yang dijalankan oleh Bumdes dan Pokdarwis Desa Gunung Rejo terutama yang berkaitan dengan usaha kepariwisataan dan lingkungan sosial juga berjalan kondusif.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor pendukung : Para agen pelaksana kebijakan sudah memusatkan perhatian kepada masyarakat dan alam, Para agen pelaksana sudah sepakat menolak swasta dalam pengelolaan pariwisata di desa Gunung Rejo dan mengembangkan pariwisata Desa Gunung Rejo sesuai dengan era/trend yang berkembang sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2011 tentang kepariwisataan, lingkungan politik dirasa bersih dan mendukung, dari segi ekonomi sudah adanya ketercukupan modal usaha dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi kreatif yang di jalankan oleh bumdes dan pokdarwis

desa gunung rejo terutama yang berkaitan dengan usaha kepariwisataan dan lingkungan sosial juga berjalan kondusif.

2. Faktor penghambat : kurangnya ketersediaan SDM yang handal terhadap para agen pelaksana namun di sisi lain terdapat ketercukupan sumber daya finansial , komunikasi yang terjalin selama ini belum optimal karena belum adanya forum pertemuan dan laporan resmi antar agen pelaksana kebijakan.

## **6.2 Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara intensif serta memberikan pelatihan internal organisasi tentang pengembangan pariwisata dengan meningkatkan bantuan modal usaha dan pembinaan terhadap anggota pokdarwis.
2. Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan para pegiat pariwisata dan stakeholder perlu lebih mengintensifkan promosi wisata Desa Gunung Rejo dan Pesawaran secara umum, baik dalam maupun luar negeri melalui berbagai event skala nasional maupun internasional.
3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program antar instansi terkait dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran khususnya di Desa Gunung Rejo dengan mengadakan forum-forum dan pembuatan laporan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran khususnya di Desa.
4. Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu menjalin kerjasama institusional dengan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya ataupun Provinsi lain dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran terkait kemudahan akses jalan yang masih harus diperhatikan, pemberdayaan

masyarakat dan selalu menanamkan kesadaran tentang pentingnya mencintai lingkungan.

5. Pemerintah Desa Gunung Rejo lebih mengintensifkan penggunaan bantuan modal usaha dan pembinaan terhadap anggota pokdarwis melalui pelatihan pembuatan kerajinan untuk sovenir pengolahan kuliner kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Kagungan, Dian. 2017. *Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru*. CV. Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung
- Kusudianto, Hadinoto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Penerbit UI: Jakarta
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publicatio
- Moh. Nazir. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Musanef, 1996. *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*. Gunung Agung: Jakarta
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pealajar. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pitana, I. Gde dan Putu G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Andi : Yogyakarta
- Putra, Aristoni Rizki. 2019. Analisis Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Hasil Penelitian. Universitas Lampung
- Sari,Yuni. Ratna.dkk. 2013. *Pengembangan Model Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir Melalui Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal Dan Penguatan Kelembagaan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Laporan Kemajuan Penelitian Unggulan. Universitas Lampung

Spillane, James J. 1998. *Ekonomi Pariwisata*. Kanisius: Yogyakarta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D*, alfabeta: Bandung

Tangkilisan, Hessel N. 2003 . *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset: Yogyakarta

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Caps: Yogyakarta

Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa : Bandung

### **Undang-Undang dan Dokumen:**

Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 320/IV.04/HK/2018 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan

Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Destinasi Wisata Satu Desa Satu Desa Wisata Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

Profil Desa Gunung Rejo

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Pesawaran Tahun 2017-2031

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2017-2021

Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan